LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KOORDINATOR PPID
BPMP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIIKAN (BPMP)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLAIN FORMASI DAN DOKUMENTASI
(KOORDINATOR PPID)

Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

RINGKASAN 2

BAB I PENDAHULUAN 3

BABII PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK 6

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 7

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 7

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK 8

E. SENGKETA INFORMASI 12

F. SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 12

G. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 22

BAB IIIPENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI ..... 23 B. RENCANA TINDAK LANJUT 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN 24

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Daerah Istimewa Yogyakarta ini berisi tentang gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 di BPMP DIY.

Sejak masa pandemi Covid-19, Kemendikbudristek telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi secara daring bagi publik. Komunikasi digital menjadi prioritas utama sebagai media komunikasi dalam layanan informasi publik di Kemendikbudristek. Layanan ini juga tetap dilakukan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dan nama nomenklatur lembaga. Selama 2024, BPMP DIY fokus di kanal layanan informasi yaitu pada aplikasi Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP DIY (https://ult.bpmpjogja.kemdikbud.go.id). Aplikasi ini bisa berdiri mandiri namun juga tercantum dalam laman resmi BPMP DIY.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID BPMP DIY di tahun 2024. Laporan ini ditujukan kepada PPID utama Kemendikdasmen. Laporan ini juga merupakan bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID BPMP DIY dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara terukur dan berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap waktu setiap orang berusaha untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tentu saja informasi terseut harus valid dan up to date. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Penyelenggaraan negara yang baik dicirikan salah satunya dengan tersedianya keterbukaan informasi publik (KIP). Hal ini menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara khususnya di Kemdikdasmen, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai badan publik, Kemdikdasmen beserta segenap satuan kerjanya di pusat maupun di daerah sejak 2010 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek pelayanan tersebut. Hal tersebut dimulai dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam melayani masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan serta aspek-aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan di kantor pusat saja tetapi juga di berbagai satuan kerja Kemdikdasmen yang berada di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Merujuk pada turunan Undang-Undang KIP di atas, pada akhir September 2020 Kemdikdasmen telah memutakhirkan kebijakan KIP yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kebebasan berpikir sehingga mendorong para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemendikbudristek untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan pendokumentasian dan pelayanan informasi publik yang prima bagi masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan,riset, dan teknologi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, Koordinator PPID UPT BPMP DI Yogyakarta adalah atasan yang membidangi kehumasan, dalam hal ini Kepala Sub Bagian Umum. Salah satu tugasnya adalah membantu, membina, dan mendampingi tim PPID UPT BPMP DI Yogyakarta dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. Koordinator PPID UPT BPMP DI Yogyakarta memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID UPT BPMP DI Yogyakarta kepada PPID Kemendikbudristek (dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek) dengan tembusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Komisi Informasi Pusat sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Berikut adalah bagan organisasi PPID BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta:

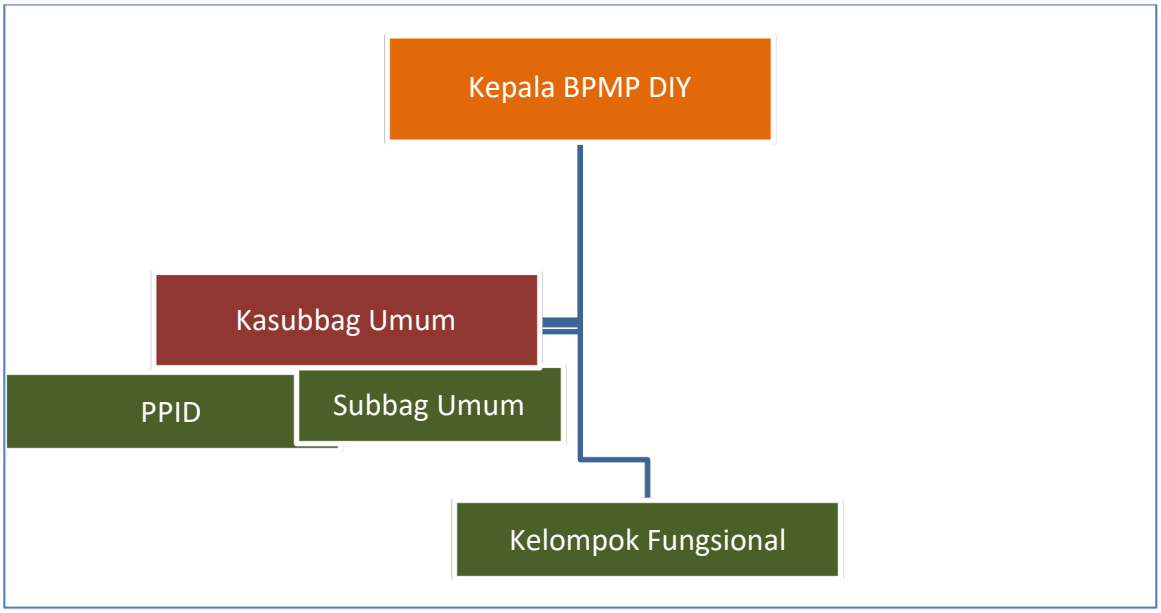

Dari aspek sarana dan prasarana, Koordinator PPID UPT BPMP DI Yogyakarta pun terus

berupaya memberikan kemudahan pelayanan informasi publik bagi masyarakat terlebih lagi masa pandemi Covid-19 sudah lewat sehingga pelayanan dapat diakses secara langsung/tatap muka oleh masyarakat. Pemutakhiran konten, fitur, dan lainnya terkait pelayanan informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dilakukan dengan sistem satu pintu. Hal ini agar memudahkan Tim Pelaksana Koordinator PPID UPT BPMP DI Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, Koordinator PPID UPT BPMP DI Yogyakarta pun melakukan optimalisasi melalui berbagai kanal. Kanal-kanal yang disediakan mulai dari Aplikasi ULT, line telepon, serta layanan laman resmi UPT.

BABII

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik bidang pendidikan di BPMP DI Yogyakarta dikoordinasikan oleh widyaprada selaku Koordinator PPID BPMP DI Yogyakarta. Pelayanan informasi publik yang berada di Kantor BPMP DI Yogyakarta diselenggarakan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek, Gedung Utama BPMP DI Yogyakarta, Jl. Tirtomartani, Kalasan, Sleman di Laman: ult.bpmpjogja.kemdikbud.go.id Telepon (0274)497002.

Jadwal pelayanan ULT BPMP DI Yogyakarta yakni sebagai berikut:

Pendaftaran : Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB

Senin s.d. Kamis : Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB)

Jumat : Pukul 09.00 s.d. 15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB)

Telepon : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB)

Prosedur layanan informasi publik di BPMP DI Yogyakarta diantaranya:

1. Permohonan informasi ke Koordinator PPID Kemendikbudristek dapat disampaikan secara langsung ke ULT Kemendikbudristek maupun tidak langsung melalui telepon. Namun, aplikasi ULT menjadi basis utama dalam pelayanan informasi publik di BPMP DI Yogyakarta.
2. Tim PPIDtengah melakukan serangkaian persiapan dalam menyediakan layanan

informasi publik yang dibutuhkan. Proses ini akan diawali dengan perombakan susunan tim yang melibatkan pejabat structural agar mudah dan efisien dalam menyiapkan informasi.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di BPMP DI Yogyakarta, lembaga belum menyediakan anggaran untuk operasional pelayanan publik dari DIPA BPMP DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Begitu pun di tahun-tahun sebelumnya. Anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk penyebarluasan informasi bidang pendidikan, penyusunan kebijakan dan pengembangan pelayanan publik, optimalisasi akses pelayanan dan pendokumentasian informasi publik, serta peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan public di BPMP DI Yogyakarta, dan lainnya.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, BPMP DI Yogyakarta telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 5 (lima) orang petugas PPID dengan berbagai latar belakang jabatan, pendidikan dan kompetensi. Mereka berasal dari beberapa bagian di BPMP DI Yogyakarta baik staf maupun fungsional. Namun, karena basis pelayanan dilakukan melalui ULT, BPMP DI Yogyakarta menyiapkan 2 (dua) orang petugas ULT yang melayanai selama jema kerja berlangsung. Kedua orang petugas ini juga dibantu oleh satu orang admin aplikasi yang menangangi aplikasi dan pemeliharaannya.

Dalam meningkatan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dari Kemdikdasmen, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi publik;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kemdikdasmen;
4. Memahami informasi bidang pendidikan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kemdikdasmen;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan

7. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat memberikan solusi.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung, ULT BPMP DI Yogyakarta telah menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana prasarana tersebut di antaranya:

1. Ruang pelayanan dilengkapi AC
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor
3. Komputer dan printer/fotokopi
4. Jaringan internet dan wifi
5. Pesawat telepon dan facsimile
6. Hand sanitizer
7. Jam dinding

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PPID BPMP DI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik melakukan evaluasi terkait dengan layanan yang dilakukan. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke PPID BPMP DI Yogyakarta sepanjang tahun 2024:

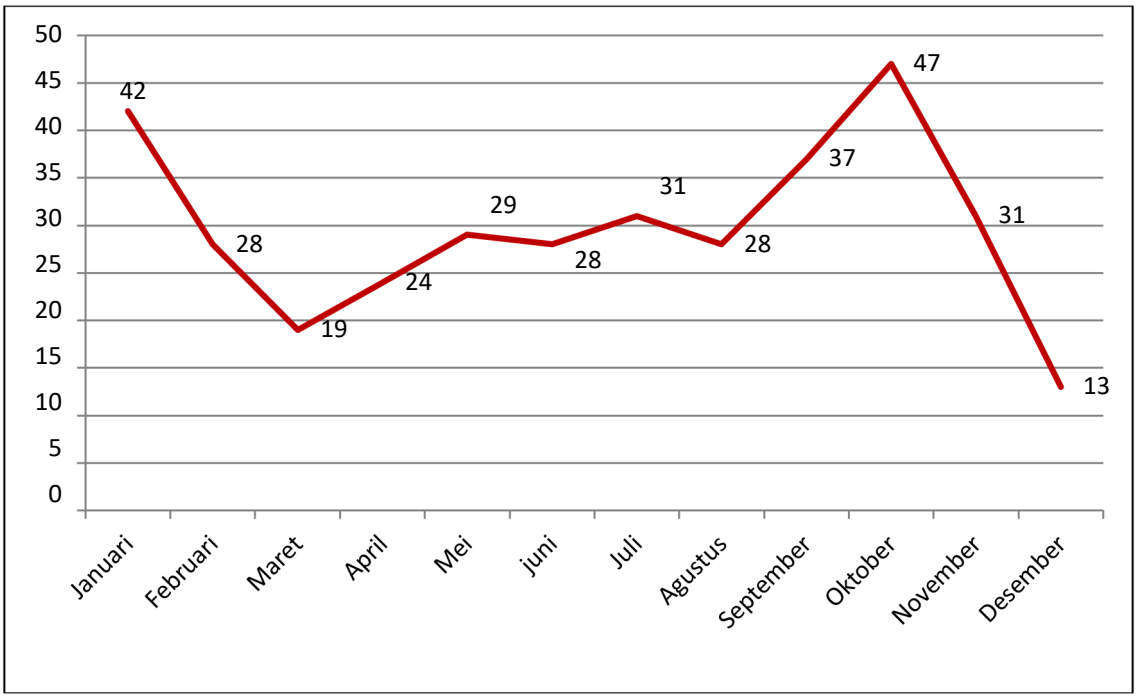

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID BPMP DI Yogyakarta baik secara online maupun tatap muka sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pemohon. Dari 357 pemohon tersebut, jumlah pemohon informasi publik secara tatap muka sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) pemohon. Sedangkan jumlah pemohon secara online sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang pemohon. Berikut grafik jumlah pemohon informasi publik berdasarkan moda permohonannya.

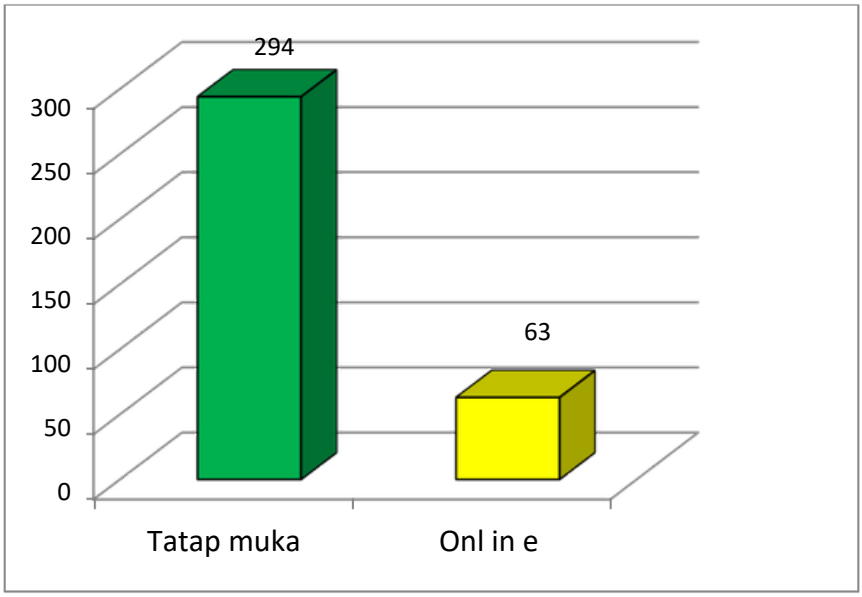

Berikut rincian permohonan informasi publik ke PPID BPMP DIY tahun 2024 berdasarkan jenis permohonan:

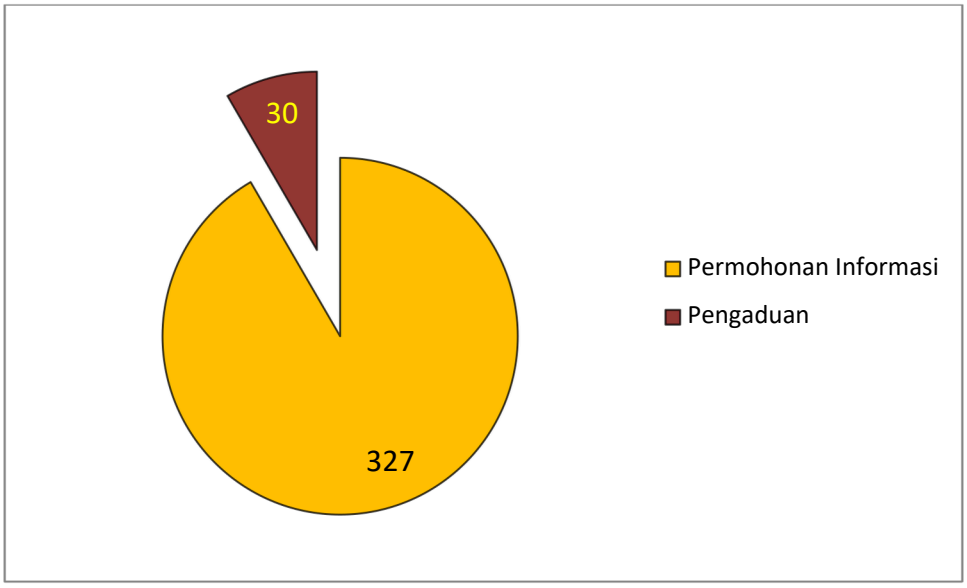

Selanjutnya, data yang ada di PPID BPMP DI Yogyakarta jenis pekerjaan para pemohon informasi publik. Berikut adalah grafik permohonan informasi publik ke PPID BPMP DI Yogyakarta berdasarkan jenis pekerjaan pemohon selama tahun 2024.

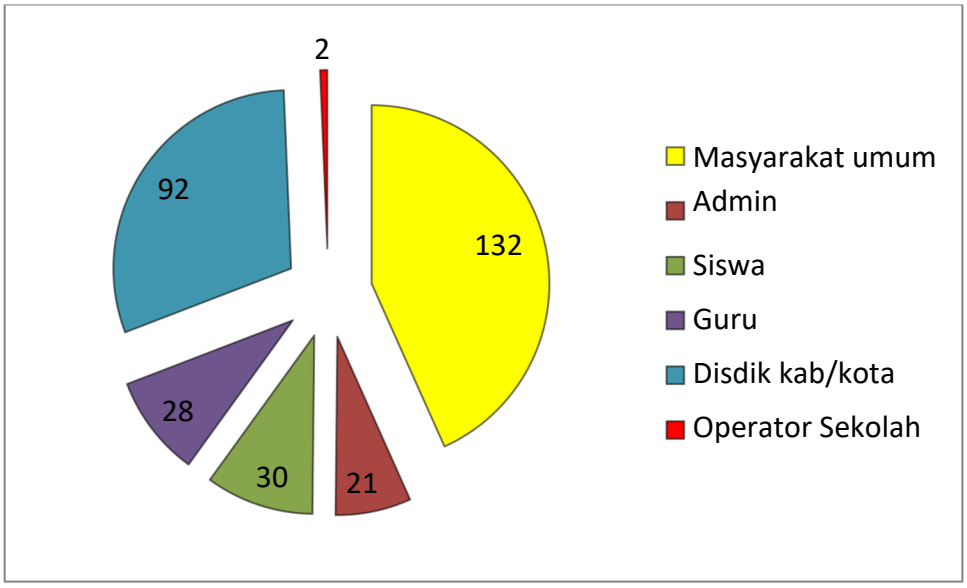

PPID BPMP DI Yogyakarta juga telah mengumpulkan data pemohon informasi publik berdasarkan wilayah pemohon. Berikut ini adalah grafik jumlah pemohon informasi publik bedasarkan wilayah pemohon.

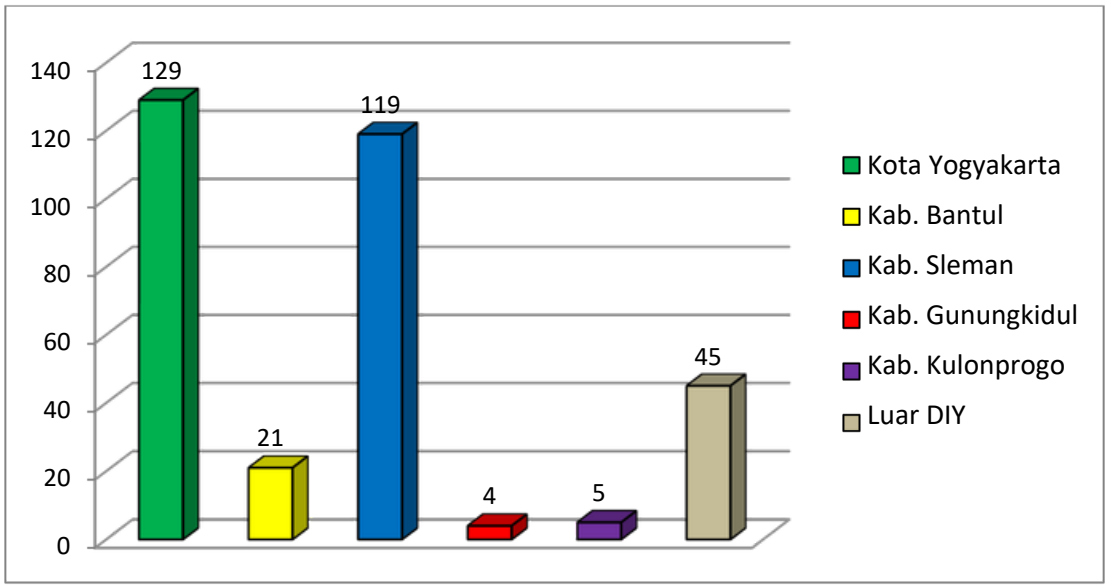

Keseluruhan permohonan informasi publik yang diajukan diproses dan ditindaklanjuti oleh petugas. Oleh karena itu, pemohon informasi pun diminta untuk memberikan umpan balik terkait kepuasan atas layanan yang diberikan. Dari data yang diperoleh PPID BPMP DI Yogyakarta, tingkat kepuasan atas layanan informasi ini dikelompkkan dalam 4 (empat) kategori. Kategori kepuasan mencakup “Sangat Puas”, “Puas”, “Tidak Puas” dan “Tidak Menilai”. Berikut ini adalah grafik hasil kepuasan pemohon informasi yang diterima dan direkapitulasi oleh PPID BPMP DI Yogyakarta selama tahun 2024.

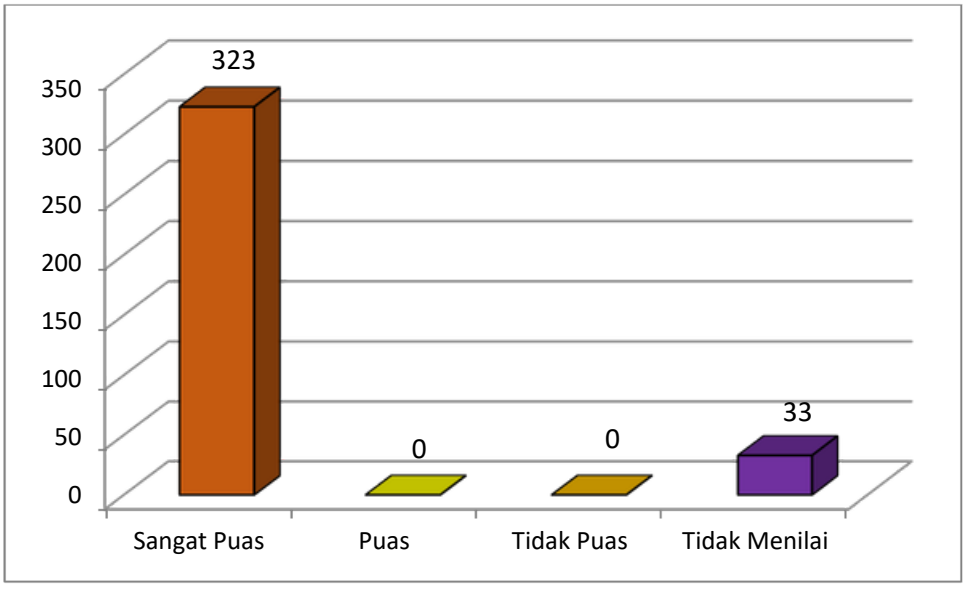

E. SENGKETA INFORMASI

Di tahun 2024, PPID BPMP DI Yogyakarta tidak menjumpai sengketa informasi. Belum ada pemohon yang merasa tidak puas atas pelayanan informasi publik yang dikelola oleh BPMP DI Yogyakarta. Hal ini sama juga dengan pelayanan informasi publik di tahun-tahun sebelumnya.

F. SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BPMP DI Yogyakarta juga menyelenggarakan survei kepuasan layanan informasi publik di BPMP DI Yogyakarta tahun 2024. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada semua pemohon informasi melalui nomor Whatsap. Kuesioner ini dikembangkan dengan menggunakan Google form sehingga memudahkan dalam pengamatan dan analisis data secara cepat.

Survei kepuasan ini direspon oleh 272 (dua ratus tujuh puluh dua) responden yang merupakan pemohon informasi di BPMP DI Yogyakarta. Karakteristik responden dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Responden berdasarkan gender

   Responden sejumlah 272 tersebut terdiri dari 160 (seratus enam puluh) orang perempuan dan 112 (seratus dua belas) orang responden Laki-laki.

2. Responden berdasarkan usia

   Responden berusia di atas 60 tahun berjumlah 10 orang. Kelompok ini merupakan yang paling sedikit jumlahnya dalam survei, namun memberikan perspektif penting dari golongan usia lanjut mengenai layanan BPMP DIY.

   Responden berusia 18-30 tahun sebanyak 32 orang. Golongan usia muda ini menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan, mencerminkan keterlibatan generasi muda dalam menilai dan memperhatikan kualitas pelayanan publik.

   Responden berusia 31-45 tahun adalah kelompok dengan jumlah 94 orang. Kelompok ini mewakili generasi produktif yang memiliki kebutuhan dan ekspektasi tertentu terhadap layanan yang diberikan oleh BPMP DIY, sehingga pandangan mereka sangat relevan untuk evaluasi dan perbaikan layanan.

   Responden berusia 46-60 tahun merupakan kelompok terbesar dalam survei ini dengan

jumlah 136 orang. Kelompok usia ini seringkali memiliki pengalaman lebih dalam berinteraksi dengan berbagai layanan public dan dapat memberikan masukan yang sangat berharga.

Responden berdasarkan jenjang pendidikan

3. Responden dengan pendidikan Diploma D1/D2/D3 berjumlah 5 orang. Kelompok ini memberikan perspektif dari mereka yang memiliki pendidikan vokasional dan teknis. Responden dengan pendidikan Pascasarjana S2/S3 merupakan kelompok yang cukup besar dengan jumlah 106 orang. Kelompok ini menunjukkan partisipasi tinggi dari mereka yang memiliki pendidikan lanjutan dan kemungkinan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan publik.

   Responden dengan pendidikan Sarjana S1/D4 adalah kelompok terbesar dalam survei ini, berjumlah 145 orang. Hal ini mencerminkan keterlibatan yang signifikan dari individu-individu dengan pendidikan tinggi dalam menilai layanan BPMP DIY.

   Responden dengan pendidikan SD/SMP berjumlah 7 orang. Meskipun jumlahnya sedikit, kelompok ini memberikan masukan yang penting dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dasar.

   Responden dengan pendidikan SMA/SMK berjumlah 9 orang. Partisipasi dari kelompok ini menambah keberagaman pandangan dalam survei, memberikan masukan dari perspektif pendidikan menengah.

   Responden berdasarkan pekerjaan

4. ASN/TNI/POLRI merupakan kelompok besar dalam survei ini dengan jumlah 96 orang. Kelompok ini mewakili pandangan dari aparatur negara yang memiliki pengalaman langsung dalam layanan public dan prosedur administrasi.

   Guru/Dosen adalah kelompok terbesar dalam survei ini dengan 120 orang. Tingginya partisipasi dari tenaga pendidik menunjukkan perhatian dan keterlibatan mereka dalam menilai kualitas layanan BPMP DIY yang mungkin berhubungan erat dengan sector pendidikan.

   Kepala Sekolah berjumlah 3 orang. Meskipun jumlahnya kecil, pandangan dari pimpinan institusi pendidikan ini memberikan masukan yang berharga tentang bagaimana layanan BPMP DIY mempengaruhi manajemen dan operasional sekolah.

Pengawas berjumlah 10 orang. Kelompok ini memberikan perspektif dari mereka yang bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi di berbagai bidang, menambah keberagaman pandangan dalam survei.

Pensiunan PNS berjumlah 2 orang. Meskipun jumlahnya sedikit, pandangan dari mereka yang telah pensiun dari layanan publik memberikan perspektif historis dan reflektif terhadap layanan yang ada.

Perangkat Desa berjumlah 1 orang. Meskipun hanya satu, masukan dari perwakilan pemerintahan desa ini penting untuk memahami bagaimana layanan BPMP DIY dirasakan di tingkatlokal.

Tenaga Kependidikan berjumlah 34 orang. Partisipasi dari staf pendukung di institusi pendidikan ini menunjukkan keterlibatan dari berbagai lapisan sector pendidikan, tidak hanya dari guru atau dosen saja.

Wiraswasta berjumlah 2 orang. Pandangan dari pelaku usaha memberikan dimensi lain dalam penilaian layanan BPMP DIY, terutama mengenai dukungan terhadap sector swasta.

Karyawan Swasta berjumlah 4 orang. Kelompok ini menambahkan variasi dalam survei dengan pandangan dari pekerja di sector non-pemerintah.

Responden berdasarkan kelembagaan

5. Responden yang berasal dari Balai Dikmen berjumlah 13 orang. Kelompok ini mewakili pandangan dari balai pendidikan menengah yang berperan penting dalam pembinaan pendidikan di tingkat menengah. Selanjutnya, responden yang berasal dari UPT Kemdikbud di DIY berjumlah 4 orang. Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di DIY ini memberikan pandangan dari perspektif operasional langsung.

   Dinas Dikpora merupakan kelompok besar dalam survei ini dengan jumlah 60 orang. Partisipasi yang signifikan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mencerminkan pentingnya penilaian dari instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan layanan pendidikan.

Sementara itu, responden yang berasal dari PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) berjumlah 7 orang. Kelompok ini memberikan pandangan dari lembaga yang fokus pada pendidikan non-formal dan pembelajaran sepanjang hayat. Begitu juga dengan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) respondennya berjumlah 4 orang. Pandangan dari SKB ini penting untuk memahami layanan yang berhubungan dengan pendidikan non-formal dan keterampilan.

Selanjutnya, di jenjang TK (Taman Kanak-kanak) berjumlah 23 orang. Pandangan dari lembaga pendidikan anak usia dini ini memberikan masukan berharga tentang layanan BPMP DIY di tingkat awal pendidikan. Sedangkan responden dari Sekolah Dasar adalah kelompok terbesar dalam survei ini dengan jumlah 81 1o5r ang. Tingginya partisipasi dari sekolah dasar

menunjukkan perhatian yang besar dari tingkat pendidikan dasar dalam menilai layanan BPMP DIY. Sedangkan responden dari SLB (Sekolah Luar Biasa) berjumlah 3 orang. Kelompok ini memberikan perspektif dari sekolah yang melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sejalan dengan jenjang tersebut, responden jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) berjumlah 31 orang. Partisipasi dari sekolah menengah pertama menunjukkan keterlibatan yang signifikan dari tingkat pendidikan menengah awal.

Selanjutnya, responden survey di jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) berjumlah 15 orang. Partisipasi dari sekolah menengah atas menambah variasi pandangan dari tingkat pendidikan menengah. Begitu juga dengan responden di jenjang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) berjumlah 2 orang. Pandangan dari sekolah kejuruan ini penting untuk memahami layanan yang mendukung pendidikan vokasional dan teknis.

Responden survey yang berasal dari Perguruan Tinggi berjumlah 17 orang. Partisipasi dari institusi pendidikan tinggi menambah perspektif akademik yang lebih lanjut. Sementara itu, rsponden yang berasal dari Ponpes (Pondok Pesantren) berjumlah 2 orang. Pandangan dari lembaga pendidikan berbasis agama ini penting untuk memahami layanan yang mendukung pendidikan keagamaan.

Responden survey yang berasal dari Pemerintah Desa berjumlah 1 orang. Masukan dari pemerintahan desa ini penting untuk memahami bagaimana layanan BPMP DIY dirasakan di tingkat lokal. Sedangkan responden yang berprofesi sebagai Petani berjumlah 1 orang. Meskipun jumlahnya kecil, pandangan dari seorang petani memberikan perspektif unik dari sektor pertanian. Hal ini sama dengan responden yang berkategori sebagai Konsultan Independen berjumlah 1 orang. Pandangan dari konsultan independen ini penting untuk menambah variasi pandangan profesional. Selanjutnya, yang terakhir adalah responden yang berasal dari Instansi Pemerintah non Dikpora berjumlah 7 orang. Partisipasi dari instansi pemerintah lain di luar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menambah dimensi lain dalam penilaian layanan BPMP DIY.

Darihasil survei tersebut, responden memberikan penilaian berdasarkan unsur-unsur atau komponen survei sebanyak sembilan 1u6n sur. Instrumen survei dikembangkan dengan

menggunakan skala Likert 4 (empat) pilihan jawaban yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”. Berikut ini adalah uraian hasil survei sesuai dengan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat.

1. Persyaratan

Data survei terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi saat memohon informasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	137	50.37%
Setuju	131	48.16%
Tidak Setuju	2	0.74%
Sangat Tidak Setuju	2	0.74%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu 97.79% (268 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa layanan BPMP DIY dinilai tidak berbelit, mudah, sederhana, sehingga mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat. Hanya 0.74% (2 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

2. Sistem, mekanisme, prosedur

Data survei terkait dengan Sistem, mekanisme dan prosedur yang harus dilalui saat memohon informasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	137	50.37%
Setuju	131	48.16%
Tidak Setuju	2	0.74%
Sangat Tidak Setuju	2	0.74%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu 97.79% (268 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa layanan BPMP DIY dinilai sederhana, tidak rumit bagi masyarakat. Hanya 0.74% (2 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

3. Waktu penyelesaian

Berikut adalah hasil jawaban responden survei terkait dengan waktu penyelesaian permohonan informasi publik di BPMP DI Yogyakarta.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	127	46.69%
Setuju	139	51.1%
Tidak Setuju	3	1.1%
Sangat Tidak Setuju	3	1.1%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sejumlah 97.79% (266 orang) memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju"dan "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa layanan BPMP DIY dinilai cepat, tepat waktu, dan tuntas oleh sebagian besar masyarakat. Hanya 2.20% (6 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap waktu layanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mencerminkan bahwa BPMP DIY telah berhasil memenuhi harapan masyarakat dalam hal waktu layanan yang diberikan. Respon cepat, ketepatan waktu, dan penyelesaian layanan yang tuntas telah diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi dalam survei ini.

4. Biaya/tarif

Terkait dengan biaya atau tarif yang dikenakan dalam permohonan informasi, respon yang diberikan oleh responden dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	153	56.25%
Setuju	116	42.65%
Tidak Setuju	1	0.37%
Sangat Tidak Setuju	2	0.74%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu 98.90% (269 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa petugas BPMP DIY dinilai transparan dan tidak ada pungutan biaya oleh sebagian besar masyarakat. Hanya 1.10% (3 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kompetensi dan perilaku pelaksana layanan serta biaya layanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mencerminkan bahwa BPMP DIY telah berhasil memenuhi harapan masyarakat dalam hal biaya layanan yang diberikan. Pelayanan informasi tidak memberatkan pemohon bahkan tidak dipungut biaya apapun. Hal ini telah diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi dalam survei ini.

5. Produk layanan

Berikut adalah hasil jawaban responden terkait produk layanan informasi di BPMP DI Yogyakarta.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	114	41.91%
Setuju	151	55.51%
Tidak Setuju	4	1.47%
Sangat Tidak Setuju	3	1.1%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 97.42% (265 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa produk layanan BPMP DIY dalam bidang akademik, informasi dan lain sebagainya dinilai sesuai dengan kebutuhan dan harapan oleh sebagian besar masyarakat. Hanya 2.57% (7 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap produk layanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mencerminkan bahwa BPMP DIY telah berhasil memenuhi harapan masyarakat dalam hal produk layanan yang diberikan. Produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat telah diapresiasi oleh sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam survei ini.

6. Perilaku pelaksana

Terkait dengan perilaku pelaksana dalam melayani permohonan informasi, respon yang diberikan oleh responden dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	153	56.25%
Setuju	116	42.65%
Tidak Setuju	1	0.37%
Sangat Tidak Setuju	2	0.74%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu 98.90% (269 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa petugas BPMP DIY dinilai sangat baik, ramah, cekatan serta tanggap terhadap pemohon. Hanya 1.10% (3 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kompetensi dan perilaku pelaksana layanan serta biaya layanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mencerminkan bahwa BPMP DIY telah berhasil memenuhi harapan masyarakat dalam hal perilaku pelaksana layanan yang cakap, ramah, cekatan, dan ikhlas telah diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi dalam survei ini.

7. Kompetensi pelaksana

Terkait dengan kompetensi pelaksana dalam melayani permohonan informasi, respon yang diberikan oleh responden dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	153	56.25%
Setuju	116	42.65%
Tidak Setuju	1	0.37%
Sangat Tidak Setuju	2	0.74%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu 98.90% (269 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa petugas BPMP DIY dinilai sangat kompeten oleh sebagian besar masyarakat. Hanya 1.10% (3 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kompetensi pelaksana layanan. Secara keseluruhan, hasil survei ini mencerminkan bahwa BPMP DIY telah berhasil memenuhi harapan masyarakat dalam hal kompetensi pelaksana layanan yang terkait erat juga dengan perilaku pelaksana layanan. Pelayanan yang cepat, tepat dan efektif telah diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi dalam survei ini.

8. Penanganan pengaduan

Pada unsur penanganan pengaduan, data hasil jawaban responden survei dapat dilihat dalam tabel berikut.

Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Sangat Setuju	89	32.72%
Setuju	178	65.44%
Tidak Setuju	3	1.1%
Sangat Tidak Setuju	2	0.74%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 98.16% (267 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa pengaduan dan saran dari masyarakat kepada BPMP DIY dinilai telah ditindaklanjuti dengan baik. Hanya 1.84% (5 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap penanganan pengaduan dan saran yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mencerminkan bahwa BPMP DIY telah berhasil memenuhi harapan masyarakat dalam hal penanganan pengaduan dan saran. Tindak lanjut yang efektif dan responsive terhadap pengaduan dan saran masyarakat telah diapresiasi oleh sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam survei ini.

9. Sarana prasarana

Data survei terkait dengan sarana prasarana yang disediakan dalam layanan informasi di BPMP DI Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

% Opsi Jawaban	Jumlah Jawaban	
Sangat Setuju	137	50.37%
Setuju	131	48.16%
Tidak Setuju	2	0.74%
Sangat Tidak Setuju	2	0.74%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu 97.79% (268 orang), memberikan penilaian positif dengan memilih opsi "Sangat Setuju" atau "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa layanan BPMP DIY dinilai didukung dengan sarana dan prasarana yang baik oleh sebagian besar masyarakat. Hanya 0.74% (2 orang) yang memilih opsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju", menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

G. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BPMP DI yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Struktur tim PPID sangat minim personil. Hal ini ditambah lagi dengan ketiadaan salah satu pejabat struktural yang seharusnya menjadi koordinator atau ketua tim. Posisi membawa dampak pada sulitnya mengkoordinir dan mengumpulkan berkas dokumen yang dibutuhkan.
2. Tidak adanya anggaran khusus yang disiapkan untuk PPID BPMP DI Yogyakarta yang berakibat pada tidak optimalnya pelayanan baik dari sisi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Orientasi pelayanan masih dititikberatkan pada layanan ULT. Aplikasi ULT sudah saatnya disesuaikan dengan kebijakan kementerian yang baru
4. Kebijakan dan keseriusan pejabat di BPMP DI Yogyakarta dalam menyediakan layanan informasi public masih dalam tahap belajar dan belum sepenuhnya menyadari pentingnya layanan dimaksud.
5. Pemahaman terhadap peratiran tentang keterbukaan informasi public masih sangat minim sehingga belum membangkitkan kemauan untuk bergerak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari PPID BPMP DI Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BPMP DI Yogyakarta:

1. Penataan ulang struktur atau susunan tim PPID BPMP DI Yogyakarta dalam rangka percepatan, efisiensi dan efektifitas layanan;
2. Mendorong pimpinan BPMP DI Yogyakarta untuk menyediakan anggaran bagi penataan dan pengembangan kegiatan PPID termasuk layanan informasi publik;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam penyiapan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID BPMP DI Yogyakarta dan tim pelaksananya; dan
4. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BPMP DI Yogyakarta secara berkala dan berkesinambungan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID BPMP DI Yogyakarta:

1. Anggaran yang cukup untuk kegiatan layanan informasi publik;
2. Melaksanakan Forum Komunikasi Publik dalam rangka menentukan layanan informasi;
3. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
4. Mengikuti atau memperoleh nominasi penghargaan pelayanan publik tahun 2025. Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BPMP DI Yogyakarta Tahun 2024. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya sehingga makin transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Ketua PPID BPMP DI Yogyakarta,

Agus Hari Prabowo, S.Pd, M.Pd
NIP 1